

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK
TERHADAP PENINGKATAN PBB DI KOTA MAKASSAR**

Disusun Oleh :

Irenza Avin Sari Umar

NIM : 4519013070



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar
Pajak Terhadap Peningkatan PBB di Kota Makassar

Nama : Irenza Avin Sari Umar

Stambuk/NIM : 4519013070

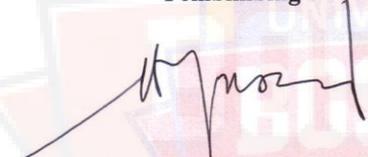
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Muhammad Yusuf Saleh, SE., M.Si


Faridah, S.E., M.Si., Ak., CA

Mengetahui dan Mengesahkan :

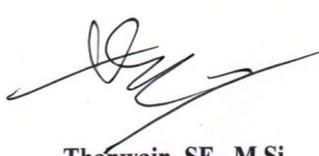
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

Ketua Prodi Akuntansi



Dr. Herminawaty Abubakar, SE., MM


Thanwain, SE., M.Si

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irenza Avin Sari Umar

NIM : 4519013070

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Judul : Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak
Bumi dan Bangunan Di Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 18 Juli 2023
Mahasiswa yang bersangkutan



Irenza Avin Sari Umar

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Terhadap Peningkatan PBB di Kota Makassar”** sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dilandasi dengan penuh kesungguhan dan kesabaran serta bantuan, bimbingan dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih atas segala bantuan dan doanya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST., M.Si
2. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
3. Ibu Indrayani Nur, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
4. Bapak Thanwain S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Yusuf Saleh, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Faridah S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan

mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima Kasih atas kesediaannya berbagi pengetahuan yang sangat berharga.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan baik online maupun offline sebagai dasar penulisan skripsi ini. Beserta seluruh staff Universitas Bosowa yang terlibat, terima kasih atas bantuannya selama pengurusan administrasi.
7. Bapak Indirwan Dermayasair S.ST dan Bapak Ferdiansah S.E beserta staf Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar. Terima Kasih atas kesempatan berharga yang diberikan untuk dapat meneliti serta kerjasamanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya yang terkasih Ayahanda Umar Mustamin dan Ibunda tersayang Zilpa Paoeyangan S.Pd yang telah memberikan banyak doa, dukungan, motivasi, semangat, dan kasih sayang sehingga penulis sampai pada tahap ini.
9. Saudara terkasih Intan, Ivan, Decho, Deo yang sudah membantu disaat kesusahan dan selalu memberi semangat dikala penat menghampiri.
10. Teman seperjuangan Dewi, Elsa, Aisya, Bella, April, Tiara, Dila, Eno', Nada dan Zahra yang telah memberikan saya dukungan untuk mengerjakan skripsi ini serta telah mewarnai hari-hari saya selama bersama dalam proses perkuliahan.

11. Sahabat Cerong, dan PNku tercinta Herma, Jeon, Dhia, Ila', Rais, Weldi, Prince, Mila. Terima kasih selalu saling berbagi cerita dan pengalaman serta saling menyemangati. Semoga sukses di masa depan
12. Xiao Dejun, Huang Renjun, Jung Jaehyun, Lee Haechan dan Member NCT lainnya yang telah menjadi moodbooster bagi saya selama melewati masa-masa sulit, serta memberikan dukungan dan motivasi secara tidak langsung melalui karya dan lagunya.
13. Seluruh teman kelas Akuntansi C dan teman seangkatan 2019, dan teman-teman yang pernah memberikan dorongan semangat, motivasi. Terima kasih sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis bukan para pemberi bantuan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan lebih menyempurnakan dan terciptanya skripsi yang lebih baik lagi.

Makassar, 18 juli 2023

Penulis

ABSTRAK

IRENZA AVIN SARI UMAR. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Terhadap Peningkatan PBB di Kota Makassar. Dibimbing oleh Muhammad Yusuf Saleh, dan Faridah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak terhadap peningkatan PBB di Kota Makassar. Dalam penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar selama periode tahun 2018-2022 mengalami perubahan yang sangat fluktuasi, hal ini terbukti dari terjadinya kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Dapat dilihat dari persentase potensi wajib pajak, yaitu 54,39%, 57,81%, 53,78%, 52,56%, 55,77% oleh karena itu, diharapkan dari pihak petugas pajak maupun wajib pajak dapat bersama-sama meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

IRENZA AVIN SARI UMAR. Analysis of Public Participation in Paying Taxes on the Increase of PBB in Makassar City. Supervised by Muhammad Yusuf Saleh and Faridah

This study aims to find out how public participation in paying taxes on the increase in PBB in Makassar City. In research using descriptive qualitative method.

The results of the study show that the level of community participation in paying land and building taxes at the Regional Revenue Agency for the City of Makassar during the 2018-2022 period has experienced very fluctuating changes, this is evident from the increases and decreases every year. It can be seen from the percentage of potential taxpayers, namely 54.39%, 57.81%, 53.78%, 52.56%, 55.77%. Therefore, it is expected that the tax officers and taxpayers can jointly increase community participation by conducting socialization on the importance of paying Land and Building Tax.

Keywords: Community Participation, Land and Building Tax

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Lingkup Penelitian	5
F. Sistematika Pembahasan	5
BAB II	6
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	6
A. Perspektif Teori.....	6
1. Pengertian Partisipasi	6
2. Pengertian Masyarakat	7
3. Partisipasi Masyarakat.....	8

4. Pengertian Pajak	9
5. Pengenaan Pajak di Indonesia	10
6. Fungsi Pajak	12
7. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	13
8. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan	14
B. Penelitian Terdahulu	15
C. Kerangka Konseptual	20
BAB III.....	21
METODELOGI PENELITIAN.....	21
A. Desain Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Fokus dan Deskripsi Fokus	21
D. Informan Penelitian.....	22
E. Jenis dan Sumber Data.....	22
F. Metode Pengumpulan Data.....	23
G. Teknik Analisis Data.....	24
H. Rencana Pengujian Keabsahan Data.....	26
I. Operasionalisasi Konsep	31
BAB IV	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian	32
1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	32
2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	33
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	33
4. Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Bapenda Kota Makassar.....	34
5. Visi dan Misi Badan Pendapatan Derah Kota Makassar.....	41
B. Temuan Penelitian.....	42
C. Pembahasan Hasil Penelitian	45
BAB IV	49
PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

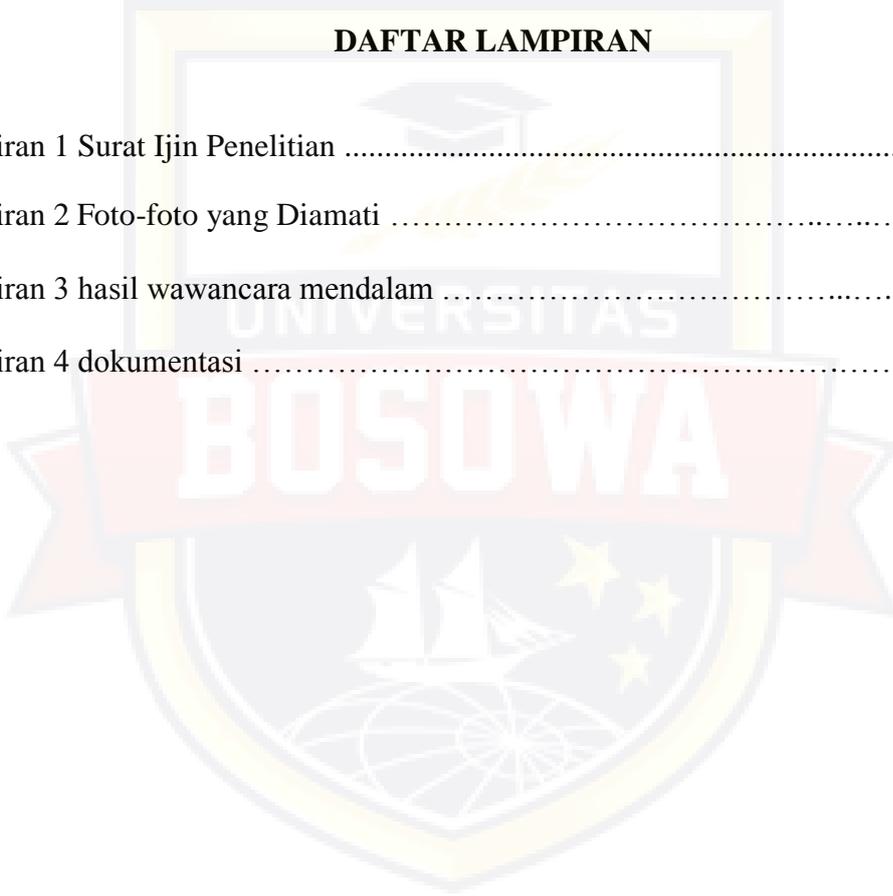
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2018-2022	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	20
Gambarl 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	33





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian	54
Lampiran 2 Foto-foto yang Diamati	55
Lampiran 3 hasil wawancara mendalam	62
Lampiran 4 dokumentasi	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan pembangunan. Meningkatkannya kebutuhan pembangunan mendorong untuk meningkatkan pendapatan dan bersikap jujur dalam mengelola setiap pendapatan masuk maupun mengelola setiap pengeluaran. Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia secara efektif dan efisien. Pajak memiliki dua jenis fungsi, sebagai penerimaan yaitu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Serta fungsi mengatur, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan dibidang keuangan dalam bidang ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan.

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar bagi negara. Aspek penunjang dalam keberhasilan serta pencapaian tujuan pembangunan nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, serta ketersediaan dana untuk pembangunan, baik itu yang bersumber dari pajak maupun non pajak. Negara dalam menjalankan roda pemerintahannya memerlukan dana yang cukup besar untuk dapat mensukseskan pembangunan nasional.

Pemungutan pajak dalam ketentuan khusus perundang undangan yakni Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dimaksudkan pula sebagai wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Salah satu jenis pajak di Indonesia yakni pajak Bumi Bangunan (Lena, 2012: 7). Pajak bumi bangunan tersebut merupakan penerimaan pajak oleh negara melalui APBN. Namun pada tahun 2013 pajak tersebut telah dipungut oleh pemerintah daerah menjadi pajak daerah, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Untuk mengoptimalkan pendapatannya, negara perlu menghimpun dana semaksimal mungkin dari sektor pajak, dan mengelola dana tersebut dengan baik. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan sumber penerimaan negara. Salah satu pajak yang cukup potensial adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan atau yang dikenal PBB. PBB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas tanah dan bangunan.

Partisipasi masyarakat sangatlah penting karena dengan semakin banyak masyarakat patuh dalam pembayaran pajak serta ikut berpartisipasi maka akan berdampak pada penerimaan daerah yang semakin besar. Namun pada kenyataannya beberapa hal yang ditemukan di lapangan mengenai keengganan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembayaran pajak yakni cenderung pada tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pajak

bumi bangunan, tingkat pendapatan masyarakat serta sikap masyarakat yang dalam hal ini diinterpretasikan dalam sikap kesadaran masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangatlah penting dalam meningkatkan kemauan masyarakat dalam membayar pajak.

Faktor yang menghambat dalam membayar pajak adalah kurangnya partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak yang menyebabkan pembayaran pajak tidak berjalan dengan efektif. Adanya sebagian besar masyarakat sebagai pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Adanya sebagian masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan, bukanlah usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang berpartisipasi untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu fungsi pembayaran pajak itu sendiri.

Adapun data partisipasi masyarakat Kota Makassar dalam membayar pajak dari Tahun 2018-2022 yaitu pada tahun 2018 wajib pajak yang membayar pajak sebanyak 197.653, tahun 2019 sebanyak 203.696, tahun 2020 sebanyak 191.542, tahun 2021 sebanyak 191.266, dan tahun 2022 sebanyak 207.469.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Terhadap Peningkatan PBB di Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Terhadap Peningkatan PBB Di Kota Makassar?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Terhadap Peningkatan PBB Di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan penulis dalam bidang akuntansi perpajakan mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar pajak terhadap peningkatan pajak PBB di Kota Makassar.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah kota Makassar khususnya aparat pengelola pajak kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak PBB.

3. Bagi Akademis

Sebagai bahan pertimbangan dan penambah pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi dan sebagai pengembangan penelitian bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian sejenisnya.

E. Lingkup Penelitian

Dari latar belakang yang sudah peneliti uraikan diatas, maka lingkup penelitian dari penelitian ini meliputi :

Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Terhadap Peningkatan Pajak PBB di Kota Makassar.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi tiga bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama dalam penelitian ini akan didahului dengan halaman sampul, halaman pengesahan, dan daftar isi.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab yaitu : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua atau tinjauan pustaka dan kerangka teori memuat uraian lengkap tentang kajian teori pada penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka piker, dan hipotesis yang relevan dan terkait dengan penelitian ini.

Pada bab ketiga atau metode penelitian memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, instrument penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis data, definisi operasional, dan jadwal penelitian yang terstruktur.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Perspektif Teori

1. Pengertian Partisipasi

Menurut Andriani (2018) Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, Partisipasi berarti ikut serta dalam mengikuti dan menyertai suatu kegiatan. Selain itu, partisipasi juga merupakan keikutsertaan dalam mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Menurut Mikkelsen (Dalam Mira Adriani 2018) mengelompokkan partisipasi menjadi sebagai berikut:

- a) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b) Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.

- d) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks local, dan dampak-dampak sosial .
- e) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara umum atau sedapat mungkin dengan pemerintah dalam hal memberikan aspirasi dan bantuannya dalam rangka meningkatkan, dan memperlancar, dan mempermudah keberhasilan suatu usaha yang telah ditetapkan.

2. Pengertian Masyarakat

Menurut Purwaningsih (2020 : 41) menyatakan bahwa Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan dan kepribadiannya. Diperlukan seperangkat aturan dan norma agar masyarakat hidup dengan harmonis dan dijadikan kesepakatan semua anggota masyarakat untuk dipegang dan dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bersama.

Menurut Ralph Hinton, masyarakat memiliki arti sekelompok manusia yang telah bekerja dan hidup berdampingan dengan kurun waktu yang tidak singkat yang menyebabkan mereka mampu merumuskan secara jelas batas-batas social dalam mengatur diri mereka sendiri mereka juga menganggap diri mereka sebagai kesatuan sosial.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan masyarakat yang hidup bersama dalam suatu lingkungan yang menghasilkan kebudayaan dan diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan suatu aturan.

3. Partisipasi Masyarakat

Dalam (Amin et al., 2018) Partisipasi Masyarakat merupakan masyarakat yang terlibat dalam menentukan arah, skema dalam kebijakan kegiatan, mengemban tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan, serta memperoleh hasil dan manfaat secara menyeluruh. Keterlibatan masyarakat pada hakekatnya adalah partisipasi dan keterlibatan masyarakat luas atau dengan pemerintah semaksimal mungkin dalam hal membantu untuk meningkatkan, mempercepat, memfasilitasi, dan memastikan pencapaian dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang ditetapkan.

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keikutsertaan setiap warga negara secara aktif dimana dibutuhkan kesadaran dan tanggungjawab serta ketepatan waktu masyarakat dalam membayar pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan berdasarkan luas tanah dari wajib pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat ialah partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang didorong oleh kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam hal tersebut. Kesadaran keterlibatan yang dimaksud adalah sikap masyarakat dalam

membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam jangka waktu dan jumlah yang telah ditentukan.

4. Pengertian Pajak

Dari perpektif Ekonomi, Pajak adalah pemindahan sumber daya dari sector swasta (Perusahaan) ke sector publik. Pengertian Pajak berdasarkan undang-undang No.28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang-orang atau badan yang memaksa dan tidak mendapatkan imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. H. Soemitro, S.H pajak merupakan iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak adanya timbal balik (kontra-kinerja) yang dapat ditimbulkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dr. Soeparman Soemahamijaya mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma; norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Bagi Negara pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk pembiayaan Belanja Negara, baik belanja rutin, maupun belanja pembangunan.

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur-unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu, pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang, sifatnya bisa dipaksakan, tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak, pemungutan pajak

dilakukan oleh Negara, pemerintah pusat maupun daerah, dan pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan Pembangunan) untuk kepentingan masyarakat luas.

5. Pengenaan Pajak di Indonesia

Klasifikasi Pajak didukung oleh lembaga pemungut pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah :

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan. Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

a) Pajak Penghasilan PPh

Pajak Penghasilan adalah jenis yang dikenakan pada orang pribadi atau perusahaan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Poin yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik dari luar Indonesia atau dari Indonesia yang kehabisan untuk menambah kekayaan atau untuk di konsumsi oleh wajib pajak terkait dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan gaji, honorarium, hadiah dan sebagainya.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan pada Konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Perusahaan, orang-

orang pribadi, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak tersebut atau jasa kena Pajak yang dikenai PPN.

c) Pajak Penjualan atau Barang Mewah (PPnBM)

Selain karena PPN, atau Konsumsi Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah dikenakan PPnBM

d) Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan dokumen, seperti akta notaris, kwitansi pembayaran surat berharga serta perjanjian dan surat berharga yang memuat jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

e) Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan pada pemilikan atau pemanfaatan tanah ataupun bangunan. Namun seluruh realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang disampaikan kepada Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan hasil penerimaannya sebagai sumber utama APBD digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, baik pengeluaran rutin maupun tidak rutin pembangunan daerah. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yaitu:

- 1) Pajak Bahan Bakar Bermotor
- 2) Pajak Kendaraan Bermotor
- 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- 4) Pajak Rokok
- 5) Pajak Air Permukaan

Pajak Kabupaten/Kota, meliputi :

- 1) Pajak Restoran
- 2) Pajak Hotel
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan , Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

6. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan negara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluarannya termasuk belanja pembangunan. Berikut adalah 4 fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Budgeter/Anggaran

Pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang yang berasal dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke dalam kas

negara, hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara.

2. Fungsi Regulerend/Mengatur

Pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan di bidang ekonomi, politik, social, budaya, pertahanan dan keamanan.

3. Fungsi Stabilitas

Pemerintah memiliki dana untuk menjalankannya kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga terjadi inflasi yang tidak dapat dikendalikan.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk pembiayaan semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat mningkatkan pendapatan masyarakat.

7. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan pada kepemilikan atau pemanfaatan bumi atau bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak pusat tetapi hampir semuanya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan atas bumi dan tanah bangunan di bawah hokum PBB. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dalam arti material besarnya pajak yang terutang ditentukan

oleh keadaan objek pajak yaitu tanah , atau bangunan (Tim Pendidikan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, 2016 : 34)

Menurut Mardiasmo (2016:381) Pajak Bumi dan Bangunan berarti bumi adalah permukaan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi daratan dan perairan pedalaman (termasuk rawan, tambak, perairan) serta laut territorial negara Republik Indonesia. Sedangkan Bangunan adalah teknik konstruksi yang ditanam atau ditempatkan secara permanen di dalam tanah atau air.

8. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut UU No. 28 tahun 2009, dasar pengenaan PBB- P2 adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi tentu saja. Jika tidak ada transaksi jual-beli, maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

NJOP bumi/tanah ditentukan berdasarkan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) dalam suatu Zona Nilai Tanah (ZNT). Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona. Sedangkan Zona Nilai Tanah (ZNT) adalah zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang memiliki NIR yang dibatasi oleh batas penguasaan/kepemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa / kelurahan tanpa terikat batas.

Sedangkan NJOP bangunan ditentukan berdasarkan nilai bangunan. Nilai Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan

berdasarkan pendekatan biaya terdiri dari biaya komponen utama atau biaya komponen bahan bangunan dan biaya komponen fasilitas gedung.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Julia Filia Kolatung (2021)	Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Manado	Jenis Penelitian ini mengguankan Penelitian kualitatif untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain	Berdasarkan penelitian mengenai Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado didapatkan kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Kota Manado sebagai WP PBB sudah cukup baik dilihat dari realisasi

				penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado setiap tahunnya mengalami peningkatan.
2	Anggi Erlina,Elfina Okto Posmaina Damanik , dan Vtryani Tarigan (2021)	Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui variabel yang lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan Antara variabel yang satu dan lainnya.	Hasil menelitian menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Kota Pematangsiantar belum baik.
3	Mariatul Khiptiyah dan Intan Putru Winata (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap	Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif	Hasil Peneitian menunjukkan tingkat kesadaran wajib pajak di desa Serut sangat rendah karena kurangnya

		Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Serut, Boyolangu, Tulungagung		tingkat pengetahuan tentang pajak dan kurangnya tingkat SDM (Sumber Daya Manusia).
4	Susanti wahyuningsih dan Yuliati (2018)	Analisis Sikap dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang	Metode Penelitian ini adalah kuantitatif atau penelitian yang menjelaskan pengaruh sikap dan motivasi masyarakat terhadap partisipasi masyarakat.	Hasil penelitian menyatakan bahwa Sikap berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05; motivasi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi

				<p>sebesar 0,017 lebih kecil dari 0,05; dan Sikap dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam lebih kecil dari 0,05.</p>
5	Nopa eprianti dan Sri Indarti (2020)	Partisipasi Masyarakat sebagai Solusi Peningkatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif	<p>Hasil dari penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar PBB sudah baik dan lancar. Masyarakat sudah peka dan aktif dalam membayar pajak. Walaupun masih ada yang belum sukarela dalam membayar PBB.</p>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas terkait dengan Partisipasi Masyarakat dalam membaya pajak menunjukkan hasil temuan yang berbeda-beda dimana penelitian dari Julia Filing Kolatun (2021) tingkat kepatuhan masyarakat Kota manado sebagai wajib pajak sudah cukup baik dilihat dari realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Adapun penelitian dari Anggi Erlina, Elfina Okto, Posmaina Damanik, dan Vtryani Tarigan (2021) bahwa wajib pajak masih kurang berpartisipasi dalam membayar pajak. Dalam penelitian Mariatul Khipiyah dan Intan Putri Winata (2022) tingkat kesadaran wajib pajak sangat rendah karena kurangnya tingkat pengetahuan tentang pajak dan kurangnya tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) Dalam penelitian Susanti Wahyuningsih dan Yulianti (2018) bahwa sikap berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Nopa Eprianti dan Sri Indarti (2020) bahwa masyarakat sebagian sudah peka dalam membayar pajak bumi dan bangunan walaupun masih ada yang belum sukarela membayar pajak.

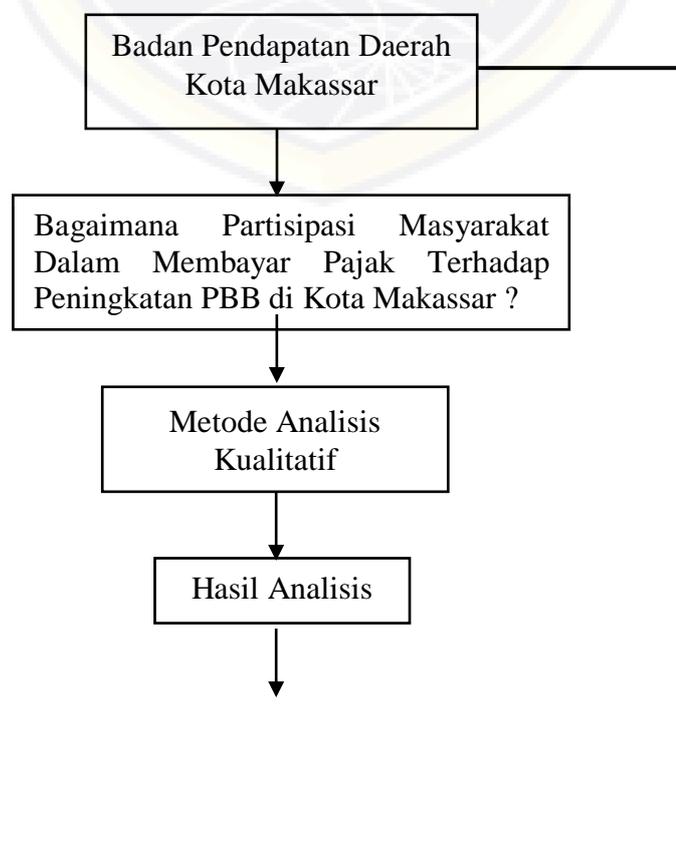
Adapun persamaan dari penelitian penulis dan penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.

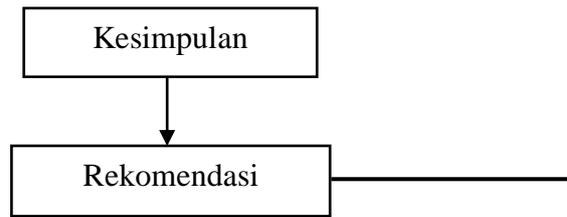
C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Adapun skema kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu :

Gambar 2.1

Kerangka Pikir





BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Desainnya bersifat alamiah maupun bersifat rekayasa manusia yang lebih memperhatikan karakteristik kualitas dan keterikatan antar kegiatan. Metode dengan pendekatan ini berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini lebih menekankan makna daripada hasil.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Penelitian ini berlokasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dipilih sebagai lokasi penelitian untuk penelitian ini.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar pajak terhadap peningkatan PBB di Kota Makassar. Fokus Penelitian merupakan suatu rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat atau pokok pembahasan di dalam suatu topik penelitian. Adanya focus penelitian ini memiliki harapan agar penelitian memiliki focus yang tepat, sehingga mampu mengumpulkan data dan melakukan analisis kata sesuai dengan tujuan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan memiliki peran penting dalam penelitian kualitatif, dimana informan merupakan sumber data atau narasumber. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar mengetahui dan menguasai permasalahan, serta terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung. Data diperoleh dari angka-angka dalam bentuk tabel yang menunjukkan penetapan dan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah kota Makassar.

b. Data Kualitatif

Data Kualitatif data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu sejarah berdirinya perusahaan dan struktur organisasi pada Badan pendapatan Daerah kota Makassar.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara peneliti terhadap objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil dokumentasi dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

F. Metode Pengumpulan Data

Berikut metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini dalam upaya mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti :

1. Penelitian lapangan (*Field Research*) melibatkan pengamatan langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu perusahaan, seperti:
 - a. Wawancara Langsung (*Interview*) penelitian yang dilakukan peneliti dengan proses komunikasi berupa tanya jawab langsung kepada Kepala UPT PBB, dan Pegawai UPT PBB bagian Pendataan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
 - b. Pengamatan (*Observation*) yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pegawai di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
2. Dokumentasi

Proses melihat atau menganalisis dokumen perusahaan digunakan dalam teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan informasi dengan melihat dokumen data penerimaan pajak bumi dan bangunan seperti Bukti Setoran Pajak atau Bukti Penerimaan Pajak.

3. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, jurnal-jurnal dan media-media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta dokumentasi agar dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya analisis deskriptif, diawali dengan pengelompokan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna setiap sub aspek dan hubungan antara satu dengan lainnya. Kemudian dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya yang menjadi fokus penelitian.

Makna di interpretasi dalam penganalisaan data dari sudut pandang informan dimana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian kualitatif membuat interpretasi data dan penarikan kesimpulan secara ideografis (dalam bentuk kekhususan) dan bukan nomotetik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian kualitatif terikat nilai dan tempat serta tidak bersifat universal. Menurut Sugiyono (2016:246) analisis data Miles dan Huberman terdiri atas *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan

secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga mencapai titik jenuh. Teknik analisis data tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data (*data collection*)

Langkah pertama dalam mengumpulkan data adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik menurut sugiyono (2016:241) merupakan teknik pengungkapan yang dilakukan kepada sumber data. Tahap mengumpulkan data dimulai dengan observasi partisipatif, kemudian wawancara dengan narasumber serta dokumentasi.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data dilakukan berdasarkan data yang diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan pemilahan data dan klasifikasi data. Menurut sugiyono (2016:247) proses reduksi data berarti proses merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya.

3. Penyajian Data (*data display*)

Menurut sugiyono (2016:249) penyajian data dalam kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Setelah melakukan reduksi kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus yang telah ditentukan.

4. Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Langkah keempat menurut Miles dan Huberman (2016:252) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan dan verifikasi

ini merupakan hasil yang menjawab keseluruhan penelitian menggunakan analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif.

H. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data yang dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan, yaitu:

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas dan/atau kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data

yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh yang telah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

2. Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).

3) Data Wawancara

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda,

maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274).

3. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007:275).

4. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:276).

5. Mengadakan *Member Check*

Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan utama *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007:276).

6. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276).

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

7. *Dependability*

Reabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

8. *Confirmability*

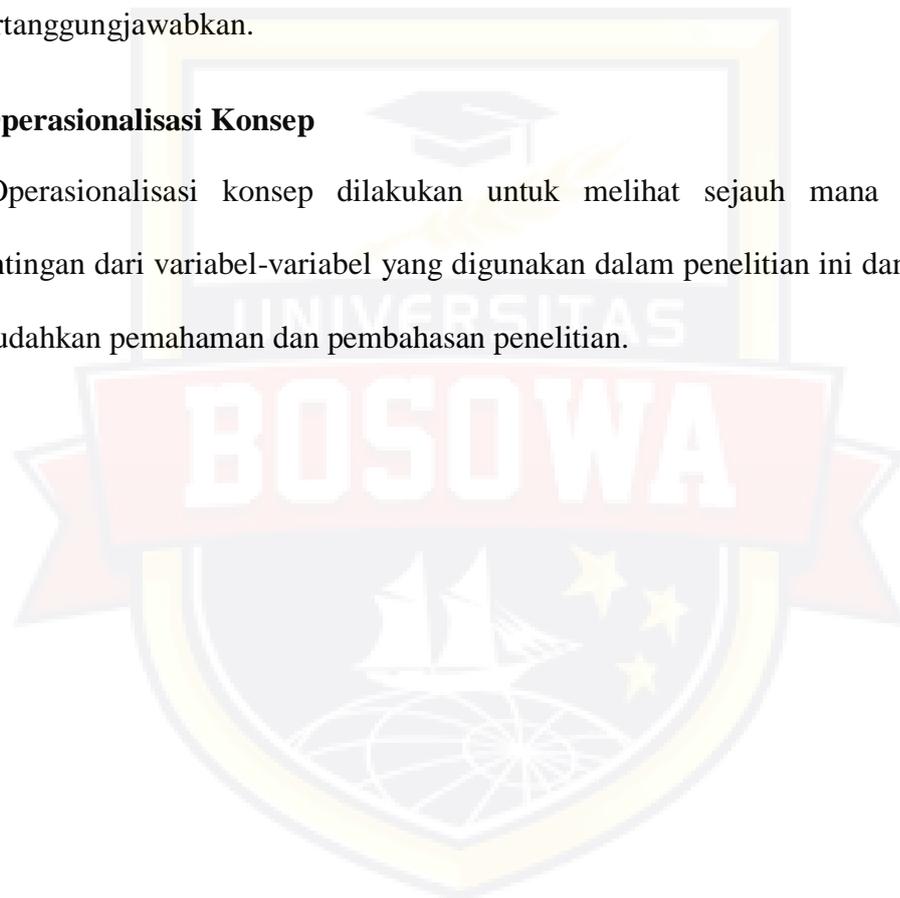
Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti

menguji hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validasi atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

I. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kepentingan dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 115/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 yang terdiri dari beberapa sub dinas pemeriksaan kendaraan tidak bermotor dan sub dinas administrasi.

Dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 bersamaan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 Nomor Keu/3/22/33 perihal pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Ujung Pandang yang telah disempurnakan dan ditetapkan berubah nama menjadi Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian menjadi unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti halnya kantor pelayanan pajak, dinas pasar dan sub dinas pelelangan ikan serta sub-sub dinas yang ada pada unit-unit pendapatan daerah yang tergabung dalam unit-unit pendapatan daerah digabung dan dimasukkan dalam unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Dengan berubahnya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, maka secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan dan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
- b. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional di bidang pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan, dan pengelolaan bahan galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya.
- d. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional di bidang bagi hasil dan pendapatan lain-lain serta intensifikasi dan ekstensifikasi.
- e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangannya.

4. Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Bapenda Kota Makassar

1. Kepala Dinas

Merencanakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi pekerjaan para anggotanya dan mengendalikan tugas-tugas dekonsentrasi, dekontruksi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan.

2. Sekretaris

Sekretariat dinas dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah tanggung jawab langsung Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
- d. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Dinas Pendapatan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas. Dalam melaksanakan tugas sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi administrasi kepegawaian dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi

- a. Melaksanakan penyusunan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Menyelenggarakan pelaksanaan beberapa kegiatan urusan ketatausahaan meliputi surat menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan pendistribusian surat sesuai dengan bidangnya
 - c. Rumah tangga kantor
 - d. Melaksanakan pengusulan promosi, mutasi dan pensiun;
 - e. Melaksanakan usulan gaji berkala, usulan tugas belajar dan izin belajar
 - f. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan tatalaksana;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang tugasnya.
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Korpri Kota Makassar;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas pembinaan terhadap anggota Korpri di unit kerja masing-masing;
 - k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: (Fathimatuz Zahra, 2020)

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan kepada Bappeda melalui Kepala Dinas;
 - d. Menyiapkan realisasi perhitungan anggaran dan penatausahaan perbendaharaan dinas;
 - e. Menghimpun dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari masing-masing unit kerja;
 - f. Menyusun laporan neraca SKPD dengan berkoordinasi dengan Sub Bagian Perlengkapan;
 - g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
5. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan tugas perlengkapan, pembuatan laporan dan

evaluasi seluruh pengadaan dan penggunaan barang. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pendapatan;
- b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas;
- c. Menyusun usulan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Sekretariat dan Bidang-bidang;
- d. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (DKB)
- e. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU)
- f. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
- g. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas Pendapatan; menyimpan dokumen dan surat-surat berharga lainnya mengenai barang inventaris daerah;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan

Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, perusahaan dan pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak hotel dan pajak hiburan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pajak Hotel dan Hiburan I menyelenggarakan fungsi

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;
- c. Melaksanakan pengembangan sistem manajemen pengelolaan pajak;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

7. Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir

Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Dalam melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir menyelenggarakan fungsi

- a. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir;
- b. Melaksanakan pengembangan sistem manajemen pengelolaan pajak;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- d. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

8. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah

Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan pengembangan sistem manajemen pengelolaan pajak;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan

Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok pengendalian, perencanaan, perumusan dan pelaksanaan pembinaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta pemeriksaan pajak dan retribusi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelenggaraan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- d. Koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;
- e. Pengendalian, pelaporan dan verifikasi;
- f. Melaksanakan koordinasi antar bagian yang terkait dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- h. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

5. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah sebagai berikut:

Visi : “pengelolaan pendapatan yang optimal online terpadu”

Misi : Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan PAD yang optimal berbasis IT secara terpadu dan terintegritasi.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

3. Memantapkan kordinasi administrasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

B. Temuan Penelitian

1. Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan yang membahas perihal retribusi daerah dan pajak daerah yaitu (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, n.d.), yang menjelaskan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa maupun kota merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, selain wilayah yang dimanfaatkan untuk aktivitas bisnis seperti perhutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang memiliki sifat kebendaan, yang berarti besarnya pajak yang pantas ditentukan oleh keadaan objeknya, besarnya pajak yang sesuai ditentukan oleh kondisi objek pajak yaitu tanah dan bangunan. PBB yaitu pajak yang secara luas difokuskan dan dikenakan atas kepemilikan maupun pemanfaatan bumi dan bangunan, maka dari itu setiap kepemilikan atau pemanfaatan atas bumi dan bangunan wajib dikenakan pajak (Yakin dan Amrulloh, 2018).

Berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah punguttan pajak yang diperoleh dari bumi seperti tanah, perairan, termasuk rawa-rawa dan tambak, serta laut yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bangunan yang terdiri dari konstruksi tetap yang diletakkan secara tetap di atas tanah atau

perairan. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan narasumber Bapak dan Staff di bidang PBB :

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar ?

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah, S.E menyatakan bahwa “ Dengan melihat tren pembayaran pajak khususnya PBB bisa dipresentasikan berada pada kondisi fluktuasi.

2. Apa saja hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah, S.E mengatakan bahwa :

- 1) Sebagian besar masyarakat Kota Makassar yang mayoritas secara perekonomian tergolong menengah kebawah mengakibatkan kurangnya kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak
- 2) Sebagian besar masyarakat Kota Makassar khususnya yang berada di pesisir kota kurang mendapat informasi tentang pajak daerah (baik dari segi manfaat dan tujuan dalam membayar pajak tepat waktu dan tepat nilai)
- 3) Kurangnya penekanan dan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak, yang mengakibatkan kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap pajak itu sendiri berkurang dan tidak dijadikan prioritas.

3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan ?

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Indirwan Dermayasair, S.ST. mengatakan:

- 1) Memberikan hadiah kepada masyarakat
- 2) Stimulan dan stimulus Pajak

4. Bagaimana peningkatan pendapatan dari Kota Makassar berdasarkan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan?

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah, S.E mengatakan bahwa “berdasarkan presentase dana atau nilai normatif penerimaan PBB, dapat digambarkan mengalami peningkatan di setiap tahun.

5. Apakah ada target yang harus dicapai setiap tahunnya? Jika ada bagaimana jika tidak mencapai target hal apa yang akan dilakukan?

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah, S.E mengatakan bahwa” Ada, upaya yang dilakukan dalam pencapaian target yaitu :

- 1) Penagihan dan menghimbau kepada wajib pajak yang belum membayar pajak yang dilakukan secara lisan ataupun dengan cara tertulis (Surat Himbuan, Surat teguran atau Surat edaran Walikota terkait pembayaran pajak).
- 2) Pemasangan spanduk atau sticker terhadap wajib pajak yang menunggak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

- 3) Meningkatkan jumlah tempat pembayaran pajak dan fasilitas pembayaran pajak lainnya.
6. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada wajib pajak jika tidak membayar pajak?

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah,S.E mengatakan bahwa “ada tiga sanksi yang diberikan yaitu:

- 1) Pengenaan denda sanksi administratif sebesar 2% per bulan
- 2) Penagihan dan menghimbau kepada wajinb pajak yang belum membayar pajak yang dilakukan secara lisan ataupun dengan cara tertulis, (Surat himbauan, surat teguran, atau surat edaran walikota terkait pembayaran pajak)

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah di masing-masing daerah, dimana hasil penerimaannya untuk kepentingan masyarakat di daerah tersebut.

Masyarakat sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan secara tepat waktu, agar tidak terjadi penumpukan utang pajak.

Tabel 4.1

Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2018-2022

NO	Tahun	Jumlah wajib Pajak PBB	Jumlah wajib Pajak Yang Membayar PBB	Jumlah wajib Pajak Yang Belum membayar PBB	Persentase Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar (%)
1	2018	363.405	197.653	165.752	54,39%
2	2019	352.334	203.696	148.638	57,81%
3	2020	356.130	191.542	164.588	53,78%
4	2021	363.834	191.226	172.608	52,56%
5	2022	372.004	207.469	164.535	55,77%
Total		1.807.707	991.586	816.121	54,02%

Sumber Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, jumlah wajib pajak yang berpartisipasi dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Makassar berada pada tingkat yang kurang baik. Hal ini dilihat dari wajib pajak setiap tahunnya mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2018 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 363.405 wajib pajak, namun hanya 197.653 wajib pajak yang membayar kewajibannya hingga mencapai 54,39%. Kemudian pada tahun 2019, wajib pajak yang terdaftar sebanyak 352.334 dan yang membayar kewajibannya hanya 203.696 wajib pajak mengalami peningkatan 3,42% sehingga menjadi 57,81%. Sedangkan pada tahun 2020 wajib pajak yang terdaftar 356.130 tetapi hanya 191.542 yang membayar sehingga mengalami penurunan 4,03% sehingga menjadi 53,78%. Pada tahun 2021 juga

mengalami penurunan wajib pajak yang membayar sebesar 191.226 dari yang terdaftar sebesar 363.834 berada pada tingkat persentase 52,56% mengalami penurunan sebesar 1,12%. Pada tahun 2022 telah mengalami kenaikan tingkat persentase sebesar 3,21% menjadi 55,77%, wajib pajak yang membayar PBB sebesar 207.469 dari jumlah wajib pajak PBB yang terdaftar sebanyak 372.004.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak PBB masih berada pada tingkat yang kurang. Selama periode 2018-2022 persentase partisipasi wajib pajak tidak pernah mencapai target, bahkan masih berada di tingkat yang sangat kurang hanya sebesar 54,02% untuk periode lima tahun terakhir.

Rendahnya partisipasi yang ada disebabkan oleh beberapa hambatan yaitu sebagian besar masyarakat Kota Makassar yang mayoritas secara perekonomian tergolong menengah kebawah mengakibatkan kurangnya kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak, sebagian besar masyarakat Kota Makassar khususnya yang berada di pesisir kota kurang mendapat informasi tentang pajak daerah (baik dari segi manfaat dan tujuan dalam membayar pajak tepat waktu dan nilai), dan kurangnya penekanan dan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak, yang mengakibatkan kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap pajak itu sendiri berkurang dan tidak dijadikan prioritas, pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Fardiansah, S.E.

Semakin tinggi partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak PBB maka semakin besar pula realisasi penerimaan pajak PBB. Walaupun tingkat partisipasi belum mencapai target tetapi realisasi penerimaannya mampu mencapai target.

Tetapi pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak PBB mengalami penurunan drastis dikarenakan tingginya target yang ditetapkan. Namun mampu menjadi penerimaan paling tinggi selama periode 2018-2022.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

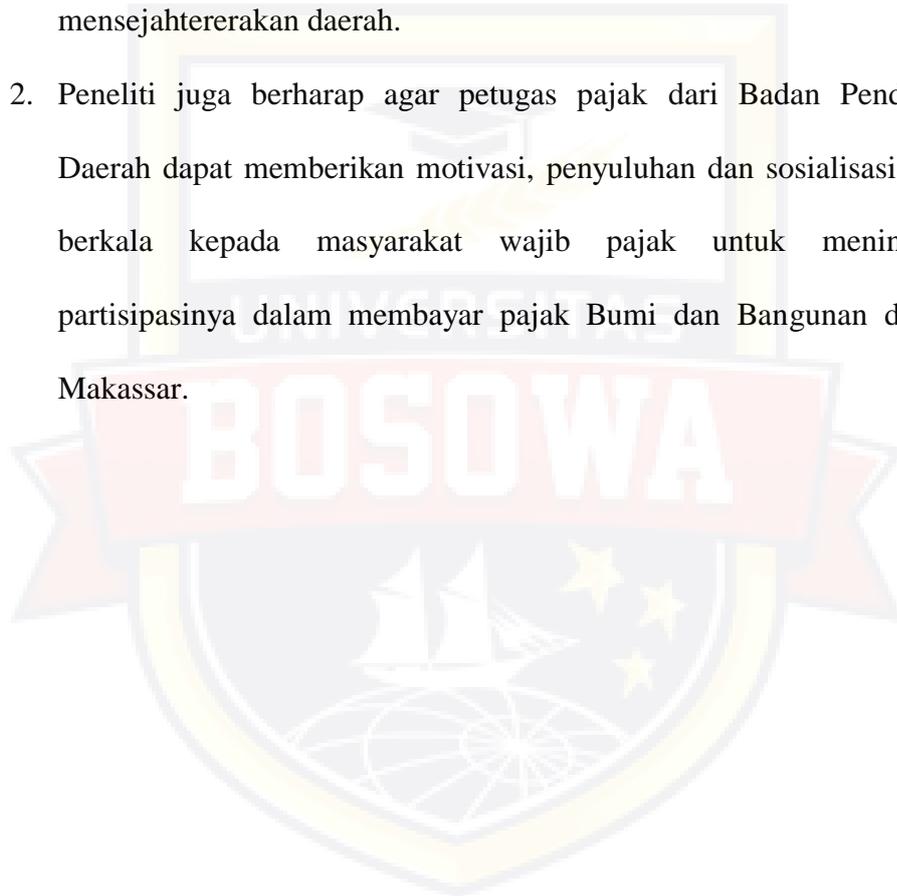
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar selama periode lima tahun terakhir mengalami perubahan yang sangat fluktuasi, hal ini terbukti dari terjadinya kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.

Ada beberapa penyebab rendahnya partisipasi yang ada di Kota Makassar yaitu sebagian besar masyarakat Kota Makassar mayoritas secara perekonomian tergolong menengah kebawah mengakibatkan kurangnya kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak, sebagian besar masyarakat Kota Makassar khususnya yang berada di pesisir kota kurang mendapat informasi tentang pajak daerah (baik dari segi manfaat dan tujuan dalam membayar pajak tepat waktu dan nilai), dan kurangnya penekanan dan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak, yang mengakibatkan kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap pajak itu sendiri berkurang dan tidak dijadikan prioritas. Walaupun mengalami kenaikan, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak PBB bahkan belum pernah mencapai target sehingga masih berada pada tingkat yang kurang.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai warga negara dan wajib pajak yang baik, sudah seharusnya dapat memberikan partisipasi dalam upaya membantu membangun daerah dengan tidak menunda dan selalu membayar pajak pada saat jatuh tempo. Wajib pajak juga harus dapat menumbuhkan kesadaran diri yang lebih tinggi untuk membantu berperan dalam membantu mensejahterakan daerah.
2. Peneliti juga berharap agar petugas pajak dari Badan Pendapatan Daerah dapat memberikan motivasi, penyuluhan dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat wajib pajak untuk meningkatkan partisipasinya dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar.





DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M. W., & Mustoffa, A. F. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem). *Owner*, 7(3), 1919–1929. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1574>
- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019). *Pengertian Partisipasi Masyarakat Theresia et all Partisipasi*. 2018, 10–39.
- Dan, B., & Tahun, B. (2023). *urnal Kompetensi Social Science*. 1, 123–134.
- Erlina, A., Posmaida Damanik, E. O., & Tarigan, V. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 3(2), 79–96. <http://jurnal.usi.ac.id/index.php/ACCUSI/index%0Ahttp://jurnal.usi.ac.id/index.php/ACCUSI/index>
- Kolatung, J. F. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 1006–1014.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- NASUTION, A. S. (2023). Cara Dan Sistem Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, Dan Fungsi Pajak. 1–23.
- Ningsih, E. K., Novianty, D. E., & Naruliza, E. (2021). Analisis Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(2), 136. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v12i2.1408>

- Nurhayati, S., Malik, A., & Mahardini, N. Y. (2022). Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Serang. *"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan*, 1(1), 54–66. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i1.1149>
- Pertiwi, I. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suneni, H. (2010). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. In *Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat (1) Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Wahyuningsih, S. (2018). *Partisipasi Pembayaran Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang*. 16(2), 112–134.
- Zahra, F., & Rulandari, N. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 45–51.

<https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1109>

The background features a large, semi-transparent watermark of the Universitas Boga logo. The logo is a shield-shaped emblem with a yellow border. Inside the shield, there is a graduation cap (mortarboard) above a golden laurel wreath. Below this, a dark banner contains the word 'UNIVERSITAS' in white capital letters. The lower portion of the shield is divided into two sections: the left shows a white sailboat on a blue sea, and the right shows three yellow stars above a white globe. The entire logo is centered on the page.

LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171
Laman dpmptsp.makassarkota.go.id Pos-el dpmptsp@makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/623/SKP/DPMPTSP/VI/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 18494/S.01/PTSP/2023 Tanggal 06 Juni 2023;
 5. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 070/640-II/BKBP/VI/2023 Tanggal 08 Juni 2023.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama : IRENZA AVIN SARI UMAR
NIM / Jurusan : 4519013070/ Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Univ. Bosowa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar
Lokasi Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
Waktu Penelitian : 05 Juni s/d 06 Juli 2023
Tujuan : Skripsi
Judul Penelitian : "ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK TERHADAP PENINGKATAN PBB DI KOTA MAKASSAR"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan Penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldaprikesbangpoldmks@gmail.com.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Makassar, 14 Juni 2023

Pih. KEPALA DINAS
SEKRETARIS

Dra. A. I. DRAWATY BR. W. Sidi
Pangkat: Pembina
Nip. 197107121990122002



2. Foto-foto yang Diamati

KECAMATAN	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
MAKASSAR	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578
BIRINGKANAYA	1.352.285.960	1.352.285.960	1.352.285.960	1.352.285.960	1.352.285.960	1.352.285.960	1.352.285.960	1.352.285.960	1.352.285.960	1.352.285.960	1.352.285.960	1.352.285.960	1.352.285.960	1.352.285.960	1.352.285.960	1.352.285.960	1.352.285.960	1.352.285.960
BONTOALA	1.706.474.000	1.706.474.000	1.706.474.000	1.706.474.000	1.706.474.000	1.706.474.000	1.706.474.000	1.706.474.000	1.706.474.000	1.706.474.000	1.706.474.000	1.706.474.000	1.706.474.000	1.706.474.000	1.706.474.000	1.706.474.000	1.706.474.000	1.706.474.000
DAERAH PELABUHAN	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000
KEP. SANGKARRANG	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000	1.125.198.000
MAKASSAR	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578	1.277.884.578
MAMAJANG	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049
MANGGALA	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049
MARISO	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049
PANAKKUKANG	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049
RAPPOCINI	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049
TALLO	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049
TAMALANREA	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049
TAMALATE	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049
UJUNG PANDANG	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049
UJUNG TANAH	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049
WAJO	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049
JUMLAH POTENSI SEKOTA MAKASSAR	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049	1.458.231.049

Data Potensi 2018

		Potensi, Target, Realisasi PBB.xlsx											
		1. Target - Realisasi		2. LO 2022		2. LO 2021		2. LO 2020		2. LO 2019		2. LO 2018	
KECAMATAN	KELURAHAN	Objek	Nilai	Objek	Nilai	Objek	Nilai	Objek	Nilai	Objek	Nilai	Objek	Nilai
BIRINGKANAYA Total		74.547	21.764.964.860	32.940	12.935.809.822	44,19%	41.607	8.829.155.038	55,81%				
BONTOALA Total		8.954	3.531.706.005	7.855	3.234.095.108	87,73%	1.099	297.610.897	12,27%				
DAERAH PELABUHAN Total		12	4.434.814.937	10	4.396.669.426	83,33%	2	38.145.511	16,67%				
KEP. SANGKARRANG Total		2.373	61.729.649	2.344	58.492.919	98,78%	29	3.236.730	1,22%				
MAKASSAR Total		12.145	5.968.252.293	9.733	5.270.337.299	80,14%	2.412	697.914.994	19,86%				
MAMAJANG Total		9.506	4.700.306.924	6.630	3.244.364.336	69,75%	2.876	1.455.942.588	30,25%				
MANGGALA Total		46.593	8.126.095.730	21.158	3.531.539.196	45,41%	25.435	4.594.556.534	54,59%				
MARISO Total		8.722	5.877.904.869	5.538	4.614.027.622	63,49%	3.184	1.263.877.247	36,51%				
PANAKKUKANG Total		32.241	29.582.427.452	18.406	20.932.471.753	57,09%	13.835	8.649.955.699	42,91%				
RAPPOCINI Total		34.179	17.528.080.787	20.553	11.669.664.936	60,13%	13.626	5.858.415.851	39,87%				
TALLO Total		20.106	6.574.917.364	15.120	5.650.241.642	75,20%	4.986	924.675.722	24,80%				
TAMALANREA Total		45.395	26.625.664.550	17.889	15.850.928.528	39,41%	27.506	10.774.736.022	60,59%				
TAMALATE Total		43.205	22.361.893.047	21.475	14.650.146.185	49,70%	21.730	7.711.746.862	50,30%				
UJUNG PANDANG Total		7.361	13.823.456.043	5.754	12.095.312.532	78,17%	1.607	1.728.143.511	21,83%				
UJUNG TANAH Total		5.557	1.046.006.167	4.819	939.600.585	86,72%	738	106.405.582	13,28%				
WAJO Total		12.509	8.928.285.761	7.429	7.705.544.514	59,39%	5.080	1.222.741.247	40,61%				
JUMLAH POTENSI SEKOTA MAKASSAR		363.405	1,80937E+11	197.653	1,26779E+11	54,39%	165.752	54.157.260.035	45,61%				

Data Potensi 2019

		Potensi, Target, Realisasi PBB.xlsx											
1. Target - Realisasi		2. LO 2022		2. LO 2021		2. LO 2020		2. LO 2019		2. LO 2018		2.	
KECAMATAN	KELURAHAN	Jumlah Potensi		Potensi Yang Terbayar			Potensi Yang Tidak Terbayar						
		Objek	Nilai	Objek	Nilai	%	Objek	Nilai	%				
BIRINGKANAYA Total		69.384	22.542.075.652	34.738	13.447.386.159	50,07%	34646	9.094.689.493	49,93%				
BONTOALA Total		8.973	4.219.444.525	7.828	3.768.026.724	87,24%	1145	451.417.801	12,76%				
KAWASAN PELABUHAN Total		12	4.253.641.113	10	4.212.064.282	83,33%	2	41.576.831	16,67%				
MAKASSAR Total		12.229	7.241.440.666	9.512	6.118.976.819	77,78%	2717	1.122.463.847	22,22%				
MAMAJANG Total		9.555	5.436.253.818	6.672	4.263.817.614	69,83%	2883	1.172.436.204	30,17%				
MANGGALA Total		47.039	8.753.096.610	22.979	3.557.441.801	48,85%	24060	5.195.654.809	51,15%				
MARISO Total		8.784	7.192.490.293	5.545	5.466.425.649	63,13%	3239	1.726.064.644	36,87%				
PANAKKUKANG Total		32.462	34.805.700.504	18.556	22.915.211.958	57,16%	13906	11.890.488.546	42,84%				
RAPPOCINI Total		34.575	20.576.895.181	21.094	13.121.025.959	61,01%	13481	7.455.869.222	38,99%				
SANGKARRANG Total		2.372	47.328.916	2.217	45.348.330	93,47%	155	1.980.586	6,53%				
TALLO Total		20.259	9.621.882.341	15.473	7.985.868.991	76,38%	4786	1.636.013.350	23,62%				
TAMALANREA Total		37.519	28.243.478.928	18.623	16.522.991.521	49,64%	18896	11.720.487.407	50,36%				
TAMALATE Total		44.114	33.964.737.066	21.992	18.774.598.500	49,85%	22122	15.190.138.566	50,15%				
UJUNG PANDANG Total		7.522	15.725.989.887	5.726	13.456.174.311	76,12%	1796	2.269.815.576	23,88%				
UJUNG TANAH Total		5.566	1.107.545.986	4.941	1.012.453.177	88,77%	625	95.092.809	11,23%				
WAJO Total		11.969	10.005.186.063	7.790	8.516.558.604	65,08%	4179	1.488.627.459	34,92%				
JUMLAH POTENSI SEKOTA MAKASSAR		352.334	2,13737E+11	203.696	1,43184E+11	57,81%	148.638	70.552.817.150	42,19%				

Data Potensi 2020

		Potensi, Target, Realisasi PBB.xlsx											
1. Target - Realisasi		2. LO 2022		2. LO 2021		2. LO 2020		2. LO 2019		2. LO 2018		2. L	
KECAMATAN	KELURAHAN	Jumlah Potensi		Potensi Yang Terbayar			Potensi Yang Tidak Terbayar						
		Objek	Nilai	Objek	Nilai	%	Objek	Nilai	%				
BIRINGKANAYA Total		70.269	24.147.103.849	33.178	13.679.176.711	47,22%	37091	10.467.927.138	52,78%				
BONTOALA Total		8.975	5.000.129.779	6.822	4.183.401.696	76,01%	2153	816.728.083	23,99%				
KAWASAN PELABUHAN Total		12	4.253.641.113	9	4.174.921.021	75,00%	3	78.720.092	25,00%				
MAKASSAR Total		12.169	8.603.494.347	8.463	6.585.261.738	69,55%	3706	2.018.232.609	30,45%				
MAMAJANG Total		9.580	6.058.892.638	6.212	4.279.635.459	64,84%	3368	1.779.257.179	35,16%				
MANGGALA Total		47.908	9.115.250.164	21.366	3.381.625.626	44,60%	26542	5.733.624.538	55,40%				
MARISO Total		8.774	7.243.597.530	5.219	5.080.718.835	59,48%	3555	2.162.878.695	40,52%				
PANAKKUKANG Total		32.770	40.263.006.195	17.342	24.608.716.064	52,92%	15428	15.654.290.131	47,08%				
RAPPOCINI Total		34.837	26.350.890.704	19.866	17.501.457.993	57,03%	14971	8.849.432.711	42,97%				
SANGKARRANG Total		2.376	54.258.856	2.269	52.050.817	95,50%	107	2.208.039	4,50%				
TALLO Total		20.396	9.113.927.625	14.643	7.651.612.826	71,79%	5753	1.462.314.799	28,21%				
TAMALANREA Total		38.665	28.731.111.215	18.262	16.471.080.409	47,23%	20403	12.260.030.806	52,77%				
TAMALATE Total		46.129	33.210.899.961	21.101	18.513.380.120	45,74%	25028	14.697.519.841	54,26%				
UJUNG PANDANG Total		7.516	17.917.470.540	5.462	13.775.234.923	72,67%	2054	4.142.235.617	27,33%				
UJUNG TANAH Total		5.573	1.271.330.664	4.234	1.093.644.296	75,97%	1339	177.686.368	24,03%				
WAJO Total		10.181	11.045.229.321	7.094	8.976.588.940	69,68%	3087	2.068.640.381	30,32%				
JUMLAH POTENSI SEKOTA MAKASSAR		356.130	2,2328E+11	191.542	1,50009E+11	53,78%	164.588	82.371.727.027	46,22%				

Data potensi 2021

1. Target - Realisasi		2. LO 2022		2. LO 2021		2. LO 2020		2. LO 2019		2. LO 2018		2. LO 2017		
KECAMATAN	KELURAHAN	Jumlah Potensi		Potensi Yang Terbayar		Potensi Yang Tidak Terbayar		Objek	Nilai	%	Objek	Nilai	%	
		Objek	Nilai	Objek	Nilai	Objek	Nilai							
BIRINGKANAYA	BAKUNG	4.943	877.348.072	2.466	360.763.541	49,89%	2.477	516.584.531	50,11%					
	BERUA	8.279	2.538.953.685	3.539	943.857.324	42,75%	4.740	1.595.096.361	57,25%					
	BULUROKENG	7.495	2.372.271.292	3.149	1.388.807.647	42,01%	4.346	983.463.645	57,99%					
	DAYU	4.565	6.260.374.884	2.038	4.644.504.572	44,94%	2.527	1.615.870.312	55,06%					
	KATIMBANG	6.262	761.445.874	2.633	187.859.947	32,47%	4.229	573.585.927	67,53%					
	LAIKANG	10.369	1.121.637.913	5.852	583.748.317	56,44%	4.517	537.889.596	43,56%					
	PACERAKKANG	7.150	813.628.350	3.194	233.624.045	44,67%	3.956	580.004.305	55,33%					
	PAI	7.062	5.383.694.720	3.825	3.539.530.453	54,16%	3.237	1.843.564.267	45,84%					
	SUDIANG	7.629	2.635.846.973	3.634	1.401.642.703	47,63%	3.995	1.234.804.270	52,37%					
	SUDHANG RAYA	8.201	1.500.736.660	4.255	563.216.293	51,88%	3.946	937.520.367	48,12%					
	UNTIA	501	248.411.144	309	200.908.145	61,68%	192	87.502.999	38,32%					
	BIRINGKANAYA Total	72.486	24.583.749.287	34.294	14.047.862.987	47,33%	38.162	10.505.886.280	52,67%					
	BONTOTALA	BARAYA	778	108.737.924	581	84.148.428	74,68%	197	24.589.496	25,32%				
		BONTOTALA	451	375.967.298	380	333.145.278	84,26%	71	42.822.020	15,74%				
BONTOTALA PARANG		703	276.244.005	493	222.157.327	70,13%	210	54.086.678	29,87%					
BONTOTALA TUA		688	171.277.181	502	141.666.185	72,97%	186	68.612.996	27,03%					
BUNGA ELAYA		713	73.239.930	561	60.262.608	78,68%	152	12.967.322	21,32%					
GADDONG		957	1.547.697.411	756	1.381.326.979	79,00%	201	166.370.432	21,00%					
LAYANG		1.215	127.564.543	1.037	115.526.612	85,35%	178	12.037.931	14,65%					
MALIMONGAN BARU		602	463.745.171	438	395.722.347	72,76%	164	68.022.824	27,24%					
PARANG LAYANG		804	392.690.152	621	322.225.737	77,24%	183	70.464.415	22,76%					
TIMUNGAN LOMPOA		789	256.969.713	551	186.835.271	69,84%	238	70.134.442	30,16%					
TOMPO BALANG		492	416.559.396	316	304.419.301	64,23%	176	112.140.095	35,77%					
WAO BARU		822	629.536.733	586	532.843.303	71,29%	236	88.693.430	28,71%					
BONTOTALA Total		9.014	4.831.419.457	6.822	4.079.479.376	74,68%	2.192	782.140.080	24,32%					
KAWASAN PELABUHAN		DAERAH PELABUHAN	12	4.253.641.113	10	4.216.710.339	83,33%	2	36.930.774	16,67%				
	Total	12	4.253.641.113	10	4.216.710.339	83,33%	2	36.930.774	16,67%					
	MAKASSAR	BARA-BARAYA	733	121.171.755	443	69.588.565	60,44%	290	51.663.190	39,56%				
		BARA-BARAYA SELATAN	858	417.609.296	591	235.636.289	68,88%	267	115.676.607	31,12%				
		BARA-BARAYA TIMUR	855	101.238.113	752	85.268.800	97,55%	103	15.969.313	12,05%				
		BARA-BARAYA UTARA	666	138.412.496	399	87.728.036	59,91%	267	50.684.460	40,09%				
		BARANA	1.012	592.692.229	708	453.581.727	69,99%	304	139.110.802	30,04%				
		LARIANG BANGI	1.164	1.382.555.552	891	1.121.172.172	76,55%	273	260.381.380	23,45%				
		MACCINI	1.020	489.492.315	664	307.942.195	65,10%	356	181.550.120	34,90%				
		MACCINI GUSUNG	1.122	390.485.409	660	311.012.496	58,82%	462	79.472.913	41,18%				
		MACCINI PARANG	1.068	212.332.816	738	150.252.632	69,10%	330	62.080.184	30,90%				
		MARADEKAYA	621	616.722.992	410	402.354.237	64,02%	211	124.366.335	33,98%				
		MARADEKAYA SELATAN	433	606.407.369	345	504.131.186	79,68%	88	102.276.183	20,32%				
		MARADEKAYA UTARA	518	551.937.491	413	404.402.523	79,73%	105	57.534.968	20,27%				
MARICAYA		1.094	1.348.735.983	766	1.025.285.776	70,02%	328	323.450.667	29,98%					
MARICAYA BARU		1.042	1.523.163.809	646	1.144.393.856	62,09%	396	375.923.433	38,06%					
MAKASSAR Total	12.206	8.489.999.025	8.426	6.480.115.090	69,03%	3.780	2.009.883.935	30,97%						
MAMAJANG	BAJI MAPPAKASUNGGU	735	294.543.935	443	168.059.454	60,27%	292	126.484.481	39,73%					
	BONTO BIRAENG	648	353.233.326	407	200.085.255	62,81%	241	153.168.071	37,19%					
	BONTO LEBANG	620	407.898.002	420	413.310.822	66,11%	200	74.187.180	24,89%					
	KARANG ANYER	644	240.362.841	329	158.332.843	51,09%	315	82.029.998	48,91%					
	LABUANG BAJI	727	287.772.022	200	211.380.513	72,20%	77	76.391.509	27,80%					
	MAMAJANG DALAM	273	868.238.179	458	534.016.999	63,35%	265	334.222.000	36,65%					
	MAMAJANG LUAR	506	688.509.559	268	588.621.536	53,07%	237	90.948.273	46,93%					
	MASDALA	552	418.295.457	429	341.972.678	78,09%	132	76.322.679	23,91%					
	MARICAYA SELATAN	862	859.877.452	541	668.747.769	62,76%	321	191.129.683	37,24%					
	PABATANG	876	129.566.600	499	114.214.369	86,64%	117	15.352.231	13,36%					
	PARANG	877	384.664.184	758	287.762.274	56,78%	379	96.901.910	43,22%					
	SAMBUNG JAWA	1.642	598.223.810	929	335.636.289	55,35%	713	266.586.704	44,65%					
	TAMPARANG KEKE	660	289.645.758	379	242.859.171	57,42%	281	46.186.587	42,58%					
	MAMAJANG Total	9.621	8.897.911.325	6.051	4.264.399.609	62,89%	3.570	1.633.811.716	37,11%					
MANGGALA	ANTANG	6.509	2.452.958.959	2.374	779.628.225	36,14%	4.195	1.673.330.734	63,86%					
	BANTUALA	6.401	1.063.852.552	2.705	345.663.061	32,96%	3.696	718.266.581	23,04%					
	BATUA	7.049	991.438.656	2.978	364.180.860	42,25%	4.071	627.257.796	57,75%					
	BIRING ROMANG	3.979	555.744.840	1.995	304.633.156	50,14%	1.984	251.111.684	49,86%					
	BITOWA	3.283	656.331.839	1.223	233.484.552	37,25%	2.060	422.847.287	62,75%					
	BOGONG	5.628	1.241.300.635	2.760	629.462.990	69,04%	2.868	613.837.636	50,80%					
	MANGGALA	8.966	1.103.494.311	4.091	415.738.224	45,63%	4.875	687.756.087	54,37%					
	TAMANGAPA	6.900	1.083.630.078	2.624	343.102.664	38,03%	4.276	740.527.414	61,97%					
	MANGGALA Total	48.775	9.148.751.860	20.750	3.415.842.641	42,54%	28.025	5.732.909.219	57,46%					
	MARISO	BONTORANNU	886	406.709.455	577	318.208.063	63,11%	309	88.411.769	34,89%				
		KAMPUNG BUIYANG	610	362.935.678	394	306.741.654	64,59%	216	56.194.024	35,41%				
		KUNJUNG MAE	837	2.086.523.656	588	1.718.630.428	70,25%	249	367.893.228	29,75%				
		LETTE	1.455	185.656.774	711	120.387.341	48,87%	744	65.269.433	51,13%				
		MARISA	657	968.123.173	402	675.350.224	57,06%	295	292.311.949	42,94%				
MARISO		1.271	208.131.028	646	129.306.504	50,83%	625	78.824.524	49,17%					
MATTOANGIN		728	1.577.272.146	417	1.174.067.798	57,28%	311	403.204.348	42,72%					
PANAMBUNGAN		1.346	1.155.650.951	648	700.108.228	48,14%	698	455.542.723	51,86%					
TAMARUNANG		1.018	234.543.857	672	275.562.544	66,01%	346	108.211.873	33,99%					
MARISO Total		8.838	7.185.686.718	6.045	5.249.717.847	57,08%	3.793	1.915.868.871	42,92%					
PANAKKUKANG		KARANGPUANG	2.330	3.635.974.711	1.206	2.353.552.080	51,76%	1.124	1.282.422.631	48,24%				
		KARUWISI	1.533	274.730.916	890	185.572.091	58,06%	643	89.158.825	41,94%				
		KARUWISI UTARA	1.160	3.256.390.666	675	2.725.910.312	58,19%	485	530.479.754	41,81%				
		MASAL	4.738	10.274.118.177	2.432	7.050.951.026	68,37%	2.306	3.223.163.548	48,07%				
	PAMPANG	3.571	1.126.211.052	1.508	475.150.538	42,23%	2.063	651.060.514	57,77%					
	PANAIRANG	3.487	3.435.666.842	1.720	2.492.282.532	49,33%	1.767	943.384.310	50,67%					
	PANDANG	3.782	5.690.544.691	2.308	3.944.490.905	60,97%	1.476	1.746.223.786	39,03%					
	PAROPO	4.001	2.203.608.074	2.162	1.506.773.397									

TALLO Total		20.479	8.817.930.532	13.887	7.289.298.954	67,81%	6.592	1.528.631.578	32,19%
TAMALANREA	BIRA	4.976	6.184.780.833	2.219	3.367.989.771	44,59%	2.757	2.816.791.062	55,41%
	BUNTUSU	6.706	1.002.713.618	3.430	377.716.565	51,15%	3.276	624.997.053	48,85%
	KAPASA	2.984	1.698.972.674	1.419	1.103.451.071	47,55%	1.565	595.521.603	52,45%
	KAPASA RAYA	3.602	2.528.245.685	1.950	1.478.796.358	54,14%	1.652	1.049.449.327	45,86%
	PARANG LOE	3.089	8.863.995.023	1.756	5.563.628.593	56,85%	1.333	3.300.366.430	43,15%
	TAMALANREA	4.928	2.093.287.221	2.507	1.092.333.082	50,87%	2.421	1.000.954.139	49,13%
	TAMALANREA INDAH	6.147	3.162.891.126	2.445	1.231.844.883	39,78%	3.702	1.931.046.243	60,22%
	TAMALANREA JAYA	7.020	2.809.328.204	2.908	1.613.135.263	41,42%	4.112	1.196.192.941	58,58%
TAMALANREA Total		39.452	28.344.214.384	18.634	15.828.896.586	47,23%	20.818	12.515.318.798	52,77%
TAMALATE	BALANG BARU	3.125	937.591.962	1.314	394.317.992	42,05%	1.811	543.273.970	57,95%
	BAROMBONG	11.094	3.059.057.894	3.937	1.380.123.854	35,49%	7.157	1.678.934.040	64,51%
	BONTO DURI	3.306	758.507.024	1.620	375.746.929	49,00%	1.686	382.760.095	51,00%
	BUNGAYA	1.411	467.594.924	772	220.654.789	54,71%	639	246.940.135	45,29%
	JONGAYA	1.881	622.295.392	893	271.726.908	47,47%	988	350.568.484	52,53%
	MACCINI SOMBALA	4.947	11.394.615.937	2.651	7.629.786.748	53,59%	2.296	3.764.829.189	46,41%
	MANGASA	5.197	2.560.922.315	2.457	1.538.297.708	47,28%	2.740	1.022.624.607	52,72%
	MANNURUKI	1.969	2.254.659.994	1.053	1.797.280.047	53,48%	916	457.379.947	46,52%
	PABAENG-BAENG	2.586	1.710.191.406	1.216	1.126.983.277	47,02%	1.370	583.208.129	52,98%
	PARANG TAMBUNG	4.688	952.761.324	2.439	456.623.400	52,03%	2.249	496.137.924	47,97%
	TANJUNG MERDEKA	8.403	10.010.722.143	3.970	6.202.504.678	47,25%	4.433	3.808.217.465	52,75%
TAMALATE Total		48.607	34.728.920.315	22.322	21.394.046.330	45,92%	26.285	13.334.873.985	54,08%
UJUNG PANDANG	BARU	1.565	2.145.669.369	1.268	1.864.938.060	81,02%	297	280.731.309	18,98%
	BULO GADING	795	2.623.186.976	623	2.362.472.433	78,36%	172	260.714.543	21,64%
	LAE LAE	373	43.136.256	133	5.207.427	35,66%	240	37.928.829	64,34%
	LAJANGIRU	841	696.054.370	540	525.714.132	64,21%	301	170.340.238	35,79%
	LOSARI	417	1.796.958.714	295	1.496.055.397	70,74%	122	300.903.317	29,26%
	MALOKU	677	1.754.800.476	468	1.303.492.330	69,13%	209	451.308.146	30,87%
	MANGKURA	466	2.589.080.169	361	2.053.316.890	77,47%	105	535.763.279	22,53%
	PISANG SELATAN	813	1.264.086.382	563	982.887.685	69,25%	250	281.198.697	30,75%
	PISANG UTARA	1.220	2.097.517.471	847	1.648.782.522	69,43%	373	448.734.949	30,57%
	SAWERI GADING	360	2.569.625.390	249	2.082.429.521	69,17%	111	487.195.869	30,83%
UJUNG PANDANG Total		7.527	17.580.115.573	5.347	14.325.296.397	71,04%	2.180	3.254.819.176	28,96%
UJUNG TANAH	CAMBA BERUA	595	70.900.408	466	55.218.490	78,32%	129	15.681.918	21,68%
	CAMBAYA	1.047	55.407.729	708	35.768.611	67,62%	339	19.639.118	32,38%
	GUSUNG	590	100.396.248	442	83.623.926	74,92%	148	16.772.322	25,08%
	PATtingALLOANG	799	38.904.751	712	31.662.572	89,11%	87	7.242.179	10,89%
	PATtingALLOANG BARU	418	28.969.620	349	25.007.448	83,49%	69	3.962.172	16,51%
	TABARINGAN	823	192.214.600	505	131.167.720	61,36%	318	61.046.880	38,64%
	TAMALABBA	564	50.081.581	361	25.792.413	64,01%	203	24.289.168	35,99%
	TOTAKA	564	153.664.466	487	133.548.247	86,35%	77	20.116.219	13,65%
	UJUNG TANAH	197	582.809.316	145	560.062.548	73,60%	52	22.746.768	26,40%
UJUNG TANAH Total		5.597	1.273.348.719	4.175	1.081.851.975	74,59%	1.422	191.496.744	25,41%
WAJO	BUTUNG	1.314	1.134.548.405	851	928.239.883	64,76%	463	206.308.522	35,24%
	ENDEH	1.056	2.211.815.508	794	1.792.821.203	75,19%	262	418.994.305	24,81%
	MALIMONGAN	894	864.651.389	562	552.379.886	62,86%	332	312.271.503	37,14%
	MALIMONGAN TUA	835	869.327.243	500	685.975.835	59,88%	335	183.351.408	40,12%
	MAMPU	664	1.074.382.561	391	814.099.618	58,89%	273	259.682.943	41,11%
	MELAYU	1.239	1.888.287.368	754	1.418.886.658	60,86%	485	469.400.710	39,14%
	MELAYU BARU	1.035	1.402.481.798	835	1.125.616.452	80,68%	200	276.865.346	19,32%
	PATTUNUANG	3.165	5.393.332.739	2.197	4.505.111.941	69,42%	968	890.220.798	30,58%
WAJO Total		10.202	14.838.827.011	6.884	11.821.731.476	67,48%	3.318	3.017.095.535	32,52%
JUMLAH POTENSI SEKOTA MAKASSAR		363.834	2.37124E+11	191.226	1,58908E+11	52,56%	172.608	78.216.332.845	47,44%

Data Potensi 2022

1. Target - Realisasi		2. LO 2022	2. LO 2021	2. LO 2020	2. LO 2019	2. LO 2018	2. LO 2017			
KECAMATAN	KELURAHAN	Jumlah Potensi		Potensi Yang Terbayar		Potensi Yang Tidak Terbayar				
		Objek	Nilai	Objek	Nilai	Objek	Nilai			
BIRINGKANAYA	BAKUNG	5.033	861.827.140	2.844	338.043.707	56,51%	2.189	523.783.433	43,49%	
	BERUA	8.341	3.139.746.628	3.871	1.399.989.702	46,41%	4.470	1.748.756.926	53,59%	
	BULUROKENG	7.487	3.688.578.747	3.618	2.380.419.647	48,32%	3.869	1.308.159.700	51,68%	
	DANYA	4.922	6.881.846.687	2.152	5.257.858.336	43,72%	2.770	1.623.982.351	56,28%	
	KATIMBANG	6.370	875.054.264	2.744	280.427.741	31,98%	3.626	594.626.463	58,02%	
	LAIKANG	10.486	1.266.067.700	6.104	650.951.024	58,21%	4.382	615.116.676	41,79%	
	PACCEBARRANG	7.085	956.397.997	3.384	281.124.633	47,76%	3.701	673.273.364	52,24%	
	PAI	7.420	6.166.490.155	4.123	4.033.385.566	55,57%	3.297	2.133.073.589	44,43%	
	SUDIANG	7.691	3.555.412.208	3.962	2.032.346.797	51,51%	3.729	1.523.065.411	48,49%	
	SUDIANG RAYA	8.501	1.694.606.791	4.418	615.703.448	51,97%	4.083	1.078.903.343	48,03%	
	UNTIA	526	395.810.063	303	278.479.757	57,98%	223	117.330.306	42,02%	
	BIRINGKANAYA Total	73.862	29.481.801.320	37.525	17.541.729.578	60,80%	36.337	11.940.071.562	49,20%	
BONTOTALA	BARAYA	779	109.229.156	547	79.416.773	70,22%	232	29.812.383	29,78%	
	BONTOALA	452	393.229.427	385	355.146.755	55,18%	67	38.082.672	14,82%	
	BONTOALA PARANG	703	283.942.206	497	236.274.380	70,70%	206	47.667.826	29,30%	
	BONTOALA TUA	690	184.926.124	512	161.237.303	74,20%	178	23.688.821	25,80%	
	BUNGA EJAYIA	713	73.662.485	612	66.325.927	55,83%	101	7.336.558	14,17%	
	GADDONG	959	1.624.710.283	813	1.518.884.767	84,78%	146	105.825.516	15,22%	
	LAYANG	1.219	129.028.202	1.122	121.260.728	92,04%	97	7.767.474	7,96%	
	MALIMONGAN BARU	603	462.145.287	477	404.997.388	79,19%	126	57.147.499	20,80%	
	PARANG LAVANG	805	801.558.754	649	339.327.178	80,62%	156	62.231.576	19,38%	
	TIRUNGAN LOMPOA	791	257.801.632	555	177.232.733	70,16%	236	80.568.899	29,84%	
	TEMPO BALANG	493	459.075.530	343	372.695.576	69,98%	148	86.379.954	30,02%	
	WAO BARU	824	659.040.823	625	595.677.681	75,85%	199	94.363.797	24,15%	
BONTOTALA Total	9.031	50.538.349.989	7.139	4.428.476.949	79,85%	1.892	6.097.820.960	20,95%		
KAWASAN PELABUHAN	DAIRAH PELABUHAN	12	4.253.641.113	10	4.216.710.339	83,33%	2	36.930.774	16,67%	
	KEP. SANGKARRANG	761	10.922.357	756	10.864.801	99,34%	5	57.556	0,66%	
	BARANA	809	32.264.383	806	31.124.866	98,09%	3	1.139.517	1,11%	
	KODINGRENG	803	19.218.919	787	18.718.125	98,01%	16	506.794	1,09%	
	KEP. SANGKARRANG Total	2.373	62.405.659	2.343	60.797.972	98,74%	30	1.697.867	1,26%	
	MAKASSAR	BARA-BARAYA	174	120.935.419	191	78.724.552	64,89%	83	46.215.068	33,11%
		BARA-BARAYA SELATAN	860	401.012.086	634	309.219.831	73,22%	226	91.792.255	26,28%
		BARA-BARAYA TIMUR	859	101.970.567	808	95.579.557	94,06%	51	6.391.210	5,94%
		BARA-BARAYA UTARA	668	141.485.930	499	115.295.385	74,70%	169	26.190.345	25,30%
		BARANA	1.622	635.090.418	729	520.521.320	71,33%	293	114.567.294	38,67%
		LARIANG BANGI	1.165	1.453.749.932	987	1.299.940.481	84,72%	178	153.809.451	15,28%
		MACCINI	1.018	486.611.101	781	378.793.473	76,22%	237	107.817.628	23,28%
MACCINI GUSUNG		1.124	401.133.708	738	329.736.884	65,66%	386	71.390.824	34,84%	
MACCINI PARANG		1.074	211.518.798	837	170.472.377	77,93%	237	41.046.421	22,07%	
MARADEKAYA		623	619.974.774	445	518.642.844	71,43%	178	101.331.930	28,77%	
MARADEKAYA SELATAN		433	617.763.273	351	526.975.876	81,06%	82	90.787.397	18,94%	
MARADEKAYA UTARA		523	563.222.638	431	519.461.948	82,41%	92	43.760.690	17,59%	
MARICAYA	1.094	1.374.507.644	793	1.138.333.571	72,49%	301	236.174.073	27,51%		
MARICAYA BARU	1.942	1.593.803.293	1.646	1.222.285.066	62,00%	296	376.518.287	38,00%		
MAKASSAR Total	12.239	8.227.779.581	9.170	7.220.980.786	74,92%	3.069	1.601.798.795	28,08%		
MAMAJANG	BAJI MAPPAKASUNGGU	737	297.259.790	455	182.968.871	61,74%	282	114.350.919	38,26%	
	LABRANG BIRANG	649	363.855.363	240	246.475.633	71,06%	409	127.382.211	28,04%	
	BONTO LEBANG	620	490.350.667	424	397.992.933	68,99%	196	92.357.134	31,61%	
	KARANG ANYER	648	240.823.478	415	189.304.807	64,04%	233	51.518.611	35,96%	
	LABRANG BAJI	777	288.913.452	230	225.969.799	79,42%	57	62.946.177	20,58%	
	MAMAJANG DALAM	723	885.564.587	489	612.866.998	67,63%	234	272.698.429	33,37%	
	MAMAJANG LUAR	505	584.231.786	282	494.523.622	55,84%	223	89.693.164	44,16%	
	MANDALA	1.554	418.996.488	478	344.492.665	81,45%	79	44.972.528	12,67%	
	MARICAYA SELATAN	881	912.726.021	642	736.900.567	72,87%	239	175.825.454	27,13%	
	PABATANG	876	130.266.602	790	117.492.636	90,18%	86	12.773.966	9,82%	
	PARANG	879	301.473.156	525	296.609.180	59,73%	354	94.866.976	40,27%	
	SAMBUNG JAWA	1.648	599.155.661	1.024	352.224.995	62,14%	624	242.930.666	47,86%	
TAMPARANG KEKI	665	289.547.817	429	247.588.248	64,51%	236	41.959.569	35,49%		
MAMAJANG Total	9.662	5.893.349.268	6.637	4.469.813.414	68,69%	3.025	1.423.538.854	31,31%		
MANGGALA	BANGKALA	6.559	2.446.482.101	3.546	749.495.794	30,82%	4.013	1.702.361.311	61,18%	
	BATUA	7.132	991.469.024	3.344	434.067.098	46,89%	3.788	557.401.926	53,11%	
	BIRING ROMANG	4.017	554.260.256	2.298	275.377.642	57,21%	1.719	278.882.814	48,79%	
	BITOGA	3.400	716.045.763	1.588	260.773.502	44,11%	2.012	455.272.261	55,89%	
	BORONG	5.654	1.248.539.777	2.841	658.402.367	50,25%	2.813	592.137.410	49,75%	
	MANGGALA	9.180	1.082.346.921	4.531	479.883.968	49,60%	4.649	602.463.953	50,64%	
	TAMANGAPA	7.707	1.169.576.775	3.301	412.839.465	42,83%	4.406	756.731.310	57,17%	
	MANGGALA Total	50.867	9.299.998.325	23.504	3.399.392.342	46,21%	27.363	5.909.511.983	53,79%	
	MARISO	BONTORANNU	900	529.860.103	578	436.793.647	64,22%	322	93.066.622	25,78%
		KAMPUNG BUYANG	609	553.748.055	459	504.811.108	75,37%	150	48.934.947	24,63%
		KUNJUNG MAE	838	2.276.698.171	709	1.988.857.526	84,61%	129	281.840.645	15,39%
		LETTE	1.458	213.187.470	855	159.682.299	58,64%	603	53.505.171	41,36%
MARIO		687	1.079.106.163	400	803.703.347	58,22%	287	275.402.816	41,78%	
MARISO		1.272	227.177.478	749	153.513.391	58,88%	523	73.664.007	41,12%	
MATTOANGIN		729	1.836.293.012	467	1.182.660.118	64,06%	262	653.632.894	35,94%	
PANAMBUNGAN		1.358	1.471.657.619	752	858.196.717	55,38%	606	613.464.902	44,62%	
TAMARUNGAN		1.031	249.944.977	698	140.749.075	67,70%	333	109.192.902	32,00%	
MARISO Total		8.882	8.431.673.080	5.667	6.228.967.064	63,80%	3.215	2.202.708.986	36,20%	
PANAKKUKANG		KARANGPUANG	2.338	6.314.264.922	1.268	3.323.619.006	54,23%	1.070	1.290.645.916	45,77%
		KARUWISI	1.534	414.932.547	1.008	200.763.445	65,71%	526	214.169.102	34,29%
	KARUWISI UTARA	1.163	4.049.912.326	783	3.407.748.571	67,33%	380	642.163.575	32,67%	
	MASALE	4.746	12.355.423.639	2.624	8.746.373.872	55,29%	2.122	3.609.049.767	44,71%	
	PAMPANG	3.617	1.158.771.810	1.745	511.986.936	48,24%	1.872	646.784.874	51,76%	
	PANAKANG	3.548	3.991.539.331	1.911	3.132.174.523	55,86%	1.637	859.364.808	46,34%	
	PANDANG	3.783	6.061.994.917	2.481	4.506.578.733	64,53%	1.302	1.555.416.184	35,47%	
	PAROPO	4.001	2.615.235.912	2.327	1.698.536.915	58,06%	1.681	916.698.997	41,94%	
	SINDRALA	738	3.839.446.004	480	2.896.256.179	65,66%	258	943.189.825	34,34%	
	TAMAMALUNG	5.213	3.180.063.976	2.867	2.028.980.413	55,09%	2.346	1.153.083.563	45,00%	
	TELLO BARU	3.160	4.203.777.303	1.569	2.428.766.011	49,65%	1.591	1.775.011.292	50,35%	
	PANAKKUKANG Total	33.841	45.888.262.687	19.023	31.879.784.824	66,21%	14.818	14.005.877.863	43,79%	
RAPPOCINI	BALLA PARANG	4.247	1.707.699.568	1.433	1.303.197.138	63,77%	314	404.412.430	36,23%	
	BANTA-BANTAENG	3.900	2.934.346.127	2.374	2.151.742.155	60,87%	1.526	782.603.972	39,13%	
	BONTO MARRIO	1.651	650.487.088	737	553.076.100	70,12%	914	97.410.988	29,88%	
	BUAKANA	2.681	3.578.048.208	1.402	2.306.120.768	52,29%	1.279	1.271.927.440	47,71%	
	GUNUNG SARI	4.133	8.830.248.278	2.209	7.508.119.538	53,45%	1.924	1.322.128.740	46,55%	
	KARUNRUNG	3.999	1.690.958.445	2.156	840.351.745	53,91%	1.843	850.606.700	46,09%	
	KASSI-KASSI	4.474	1.969.594.715	2.454	974.730.204	54,85%	2.020	994.864.511	45,15%	

3. Hasil Wawancara Mendalam

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar ?

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah, S.E menyatakan bahwa “ Dengan melihat tren pembayaran pajak khususnya PBB bisa dipresentasikan berada pada kondisi fluktuasi.

2. Apa saja hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah, S.E mengatakan bahwa :

- a. Sebagian besar masyarakat Kota Makassar yang mayoritas secara perekonomian tergolong menengah kebawah mengakibatkan kurangnya kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak
- b. Sebagian besar masyarakat Kota Makassar khususnya yang berada di pesisir kota kurang mendapat informasi tentang pajak daerah (baik dari segi manfaat dan tujuan dalam membayar pajak tepat waktu dan tepat nilai)
- c. Kurangnya penekanan dan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak, yang mengakibatkan kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap pajak itu sendiri berkurang dan tidak dijadikan prioritas.

3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan ?

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Indirwan Dermayasair, S.ST. mengatakan:

1. Memberikan hadiah kepada masyarakat, jadi setiap bulan kami melakukan pengundian kepada masyarakat untuk memberikan mereka terkait stimulus untuk membayar pajak.
2. Upaya-upaya terkait dengan stimulus harus bayar
4. Bagaimana peningkatan pendapatan dari Kota Makassar berdasarkan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan?

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah, S.E mengatakan bahwa “berdasarkan presentase dana atau nilai normatif penerimaan PBB, dapat digambarkan mengalami peningkatan di setiap tahun.

5. Apakah ada target yang harus dicapai setiap tahunnya? Jika ada bagaimana jika tidak mencapai target hal apa yang akan dilakukan?

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah, S.E mengatakan bahwa ”Ada, upaya yang dilakukan dalam pencapaian target yaitu :

1. Penagihan dan menghimbau kepada wajib pajak yang belum membayar pajak yang dilakukan secara lisan ataupun dengan cara tertulis (Surat Himbuan, Surat teguran atau Surat edaran Walikota terkait pembayaran pajak).
2. Pemasangan spanduk atau sticker terhadap wajib pajak yang menunggak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

3. Meningkatkan jumlah tempat pembayaran pajak dan fasilitas pembayaran pajak lainnya.
6. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada wajib pajak jika tidak membayar pajak?

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah,S.E mengatakan bahwa “ada tiga sanksi yang diberikan yaitu:

1. Pengenaan denda sanksi administratif sebesar 2% per bulan
2. Penagihan dan menghimbau kepada wajinb pajak yang belum membayar pajak yang dilakukan secara lisan ataupun dengan cara tertulis, (Surat himbauan, surat teguran, atau surat edaran walikota terkait pembayaran pajak

4. Dokumentasi

